

# **PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:PENDIDIKAN, PEMBELAJARAN, DAN BUDI PEKERTI**

**Ki Sugeng Subagya**

Anggota Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa

---

## **ABSTRAK**

Salah satu keistimewaan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta ialah pendidikan berbasis budaya lokal yang digali dari nilai-nilai luhur budaya baik dalam representasi historis, ideologis, dan filosofis. Pendidikan dibangun dalam rangka sistem pendidikan nasional dalam konteks hamemayu hayuning bawana. Dari Yogyakarta menyejah-terakan dunia. Pendidikan berbasis budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta terimple-mentasi melalui pembelajaran berbasis budaya untuk pembentukan budi pekerti anak didik. Pendidikan berbasis budaya mengandung pengertian bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan sistem pendidikan nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya. Dalam pembelajaran berbasis budaya dilaksanakan dalam rangka budaya sebagai isi pembelajaran, budaya sebagai metode pembelajaran, dan budaya sebagai konteks manajemen pendidikan. Dalam rangka pembentukan budi pekerti luhur pendidikan berbasis budaya mewujudkan sekolah sebagai lembaga untuk membangun anak didik berbudi pekerti luhur, berbudaya, dan selalu tanggap perkembangan global tanpa meninggalkan budaya lokal.

*Kata kunci:keistimewaan, pendidikan, pembelajaran, berbasis budaya, budi pekerti.*

---

## A. PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, layanan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh tantangan baru. Meskipun tidak secara eksplisit diatur tentang keistimewaan bidang pendidikan, namun secara implisit terdapat tugas besar bidang pendidikan untuk mengisi substansi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah daerah dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban mengisi substansi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam dalam bidang pendidikan. Salah satu diantaranya memberikan muatan “istimewa” pada setiap kebijakan dan praksis pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Cara ini dipandang relevan karena mengisi substansi keistimewaan dalam bidang pendidikan tidak akan lepas dari kebijakan dan praksis pendidikan itu sendiri.

Selain itu, pengembangan pendidikan dalam konteks keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta harus digali dari kebijakan dan praksis pendidikan yang selama ini terjadi dan telah menjadi *trade mark* Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan jauh sebelumnya merunut berdasarkan kajian historis dan filosofisnya. Predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan telah melekat sejak sebelum Daerah Istimewa Yogyakarta secara administratif ada. Menyebut kota pendidikan bagi Yogyakarta tidak dibatasi oleh wilayah administratif kota Yogyakarta semata. Cakupannya lebih luas, ialah wilayah historis, wilayah ideologis, dan wilayah filosofis. Kota Yogyakarta semakna dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam predikat kota pendidikan.

Tulisan ini bermaksud menyajikantiga hal esensial keistimewaan pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Pertama*, pendidikan berbasis budaya sebagai kekhasan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kedua*, tinjauan praksis pembelajaran berbasis budaya Yogyakarta. *Ketiga*, membangun budi pekerti melalui

pendidikan dan pembelajaran berbasis budaya. Pembahasan atas tiga hal esensial ini dilakukan dalam satu kerangka, ialah kerangka pendidikan berbasis budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Hamemayu Hayuning Bawana**

Predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan tidak terlepas dari sejarah gerakan pendidikan formal yang tumbuh dan berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan dan peran Sekolah Tamanan dan Sekolah Madya di Kraton Yogyakarta pada tahun 1848 merupakan titik awal pendidikan formal di Yogyakarta. Sekolah Tamanan dan Sekolah Madya saat itu eksklusif, terbatas diperuntukkan bagi kalangan keluarga Kraton. Pada tahun 1867 pemerintah kolonial membangun Sekolah Gubernemen. Mulai saat itulah keberadaan dan peran Sekolah Tamanan dan Sekolah Madya tergeser. Sekolah Gubernemen inilah yang kelak kemudian hari melahirkan jenjang-jenjang pendidikan formal yang saat ini dikenal sebagai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Keberadaan Sekolah Gubernemen mendorong lahirnya sekolah-sekolah swasta di Yogyakarta. Tahun 1912, Muhammadiyah lahir dengan sekolah berciri khas keagamaan. Tahun 1922 Tamansiswa lahir dengan sekolah berciri khas kebangsaan. Sejak itulah berduyun-duyun anak bangsa dari seluruh penjuru tanah air, bahkan dari manca negara, datang ke Yogyakarta untuk menimba ilmu. Mereka terdorong untuk mendapatkan layanan pendidikan prima. Hadirnya generasi muda dari seluruh penjuru nusantara menjadikan Yogyakarta sebagaikota tujuan pendidikan terkemuka. Lebih dari itu ikatan-ikatan pluralisme pembentuk demokratisasi pendidikan tumbuh dengan suburnya.

Pemaknaan demokratisasi pendidikan di Yogyakarta sangat spesifik. Tidak hanya menyentuh tataran proses pendidikan dan pembelajaran semata, namun

jauh lebih dalam dari itu, sampai pada pemaknaan filosofis. Pendidikan adalah hak warga negara, karenanya melekat di dalamnya kewajiban bagi negara untuk memenuhi hak warga negara itu. Ketika negara belum mampu memenuhi hak warga negara, peran swasta hadir menyokong untuk memberi layanan pendidikan kepada masyarakat. Konsep pendidikan dari dan untuk semua terimplementasi dengan baik.

Dalam perkembangan awalnya, pemenuhan hak warga negara atas pendidikan dapat dirunut dari konsep dasar penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah, termasuk di dalamnya sekolah-sekolah swasta. Tamansiswa misalnya, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya didasari oleh dua fungsi, ialah *zendings arbeid*, dan *reddings arbeid* (Majelis Luhur, 1969:7). *Zendings arbeid* adalah kerja duta dalam suatu masyarakat. Hal ini bermakna suatu usaha yang di dalamnya terkandung maksud untuk menyebar luaskan dan mengembangkan gagasan-gagasan dan cita-cita mulia dari suatu bangsa. Pada masa kolonial cita-cita mulia bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa merdeka yang terlepas dari cengkeraman kuku penjajahan. Karenanya pendidikan mengemban tugas mengantarkan bangsa Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaannya.

*Reddings arbeid* bermakna bahwa Tamansiswa sebagai lembaga pendidikan harus dapat menampung seluruh anak-anak Indonesia yang mempunyai keinginan masuk sekolah. Ketika anak-anak Indonesia dengan dorongan sangat kuat haus akan ilmu pengetahuan, maka tidak boleh ada penghalang apapun mereka terhambat mendapatkan layanan pendidikan. Lebih dari itu, lembaga pendidikan tidak hanya semata-mata melakukan transfer ilmu pengetahuan namun layanannya menjamin terbentuknya kepribadian anak didik secara menyeluruh.

Asumsi penulis, tidak hanya Tamansiswa yang mengembangkan konsep dasar penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga pendidikannya dengan dua

tugas mulia ini. Lembaga pendidikan yang lain-pun demikian pula. Ketika saat itu dominasi peran lembaga pendidikan swasta sangat kuat, maka sebenarnya yang paling mampu memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat adalah sekolah-sekolah swasta. Sekolah negeri masih dalam hitungan dengan jari, sekolah swasta sudah tumbuh dan berkembang dimana-mana.

Masa awal Indonesia merdeka, sekolah-sekolah swasta sangat besar perannya dalam memberikan layanan pendidikan. Saat itu sekolah-sekolah Muhammadiyah tumbuh dengan sangat cepat. Bukan hanya secara kuantitatif, namun juga secara kualitatif. Sebagai lembaga pendidikan formal yang lebih modern Muhammadiyah di Yogyakarta memiliki sekolah sampai ke pelosok-pelosok desa terpencil sekalipun. Amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan (dan kesehatan) menjadikan Yogyakarta semakin memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak muda di seluruh nusantara. Pendidikan Islam modern yang dikemas dalam pendidikan formal inilah yang di kelak kemudian hari menjadi rujukan lembaga-lembaga pendidikan swasta beraliansi agama Islam untuk mengembangkan diri.

Meminjam istilah Ahmad Syafii Maarif, visi dan misi pendidikan Muhammadiyah adalah pendidikan yang didasarkan atas nilai-nilai etis dan spiritualitas Islam, bersifat "*theo-anthropo sentris*". Pendidikan Muhammadiyah memiliki peranan yang sangat besar sebagai penggerak dan pengawal pembinaan kehidupan beragama dan akhlak serta sekaligus mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan masyarakat.

Pendidikan berbasis budaya sebagai upaya penanaman tata nilai budaya dalam diri anak didik merupakan salah satu bentuk strategi dalam implementasi nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta kedalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pada masa lampau, nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pilar utama pembentukan karakter anak didik. Pada

saatnya Yogyakarta menjadi pusat pendidikan terkemuka. Pada saatnya Yogyakarta menjadi “Indonesia Mini”. Pada saatnya Yogyakarta membangun dunia. Pada saatnya Yogyakarta hamemayu hayuning bawana.

Konsep hamemayu hayuning bawana merupakan falsafah Yogyakarta yang digagas Sri Sultan Hamengku Buwono I. Konsep ini satu rangkaian tidak terpisahkan dengan falsafah golongan gilig, sawiji, greget, sengguh, dan ora mingkuh. Hamemayu hayuning bawana merupakan visi Yogyakarta, golongan gilig sebagai semangat, sedangkan sawiji, greget, sengguh, dan ora mingkuh merupakan watak satriya Ngayogyakarta.

Dalam kajian etimologi, hamemayu atau amemayu berasal dari kata hayu atau rahayu, yang berarti selamat, sejahtera, aman, damai. Dalam morfologi bahasa Jawa, *ater-ater* atau awalan (prefiks) *ha* atau *a* berfungsi membentuk tembung kriya atau kata kerja. Dengan demikian hamemayu bermakna mewujudkan keselamatan, mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan keamanan, mewujudkan kedamaian. Sedangkan bawana berarti jagad raya atau alam semesta. Pengertiannya lebih luas daripada buwana, yang berarti bumi (planet bumi). Sehingga hamemayu hayuning bawana sebagai visi Yogyakarta bermakna “Yogyakarta Menyejahterakan Jagad Raya”.

Rumusan trihayu sesungguhnya adalah visi sebuah kelompok diskusi “Gerombolan Selasa Kliwonan” yang diawaki Ki Ageng Suryomentaram sebagai ketuanya, dan Suwardi Surjaningrat (Ki Hadjar Dewantara) sebagai paniteranya. Sebagai sebuah gerakan *renaissance*, sesungguhnya kelompok diskusi ini memiliki cita-cita tidak sebatas tercapainya Indonesia merdeka. Indonesia merdeka adalah tujuan antara untuk hamemayu hayuning salira, hamemayu hayuning bangsa, dan hamemayu hayuning bawana. Selanjutnya konsep ini dikenal sebagai “trihayu”.

Konsep trihayu menjadi lebih operasional ketika alur pikirnya dibalik. Artinya, kesejahteraan alam semesta (hayuning bawana) dibangun dari kesejahteraan bangsa (hayuning bangsa), dan kesejahteraan bangsa (hayuning bangsa) dibangun dari kesejahteraan setiap diri manusia (hayuning salira). Dari trihayu kita menemukan “watak ngayogyakarta” baru. Untuk memulai kebaikan maka mulailah dari diri kita sendiri. Hakikatnya kebaikan diri akan dapat membangun kebaikan bangsa, dan kebaikan bangsa itu sekaligus membangun kebaikan alam semesta.

Pendidikan berbasis budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya dimaknai bahwa pelaksanaan pendidikan mengacu pada kebijakan pendidikan nasional (hamemayu hayuning bangsa) yang diperkaya dengan pembentukan “watak ngayogyakarta” (hamemayu hayuning sarira) agar mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa di dunia (hamemayu hayuning bawana).

### **Pembelajaran Berbasis Budaya**

Model pembelajaran berbasis budaya dengan mengapresiasi nilai-nilai dan tradisi lokal dapat dijumpai pada tulisan hasil penelitian Plant dan Kesant (2002); Musfarayani (2004); Topatimasang (2005); Manurung (2007); dan Puspita Kusuma (2009). Di dalam penelitian-penelitian ini apresiasi terhadap tradisi lokal sebagai basis pendidikan dimunculkan dalam hubungan guru dan murid (pembelajaran). Tradisi lokal menjadi pintu masuk untuk mengenalkan sampai dengan memahami materi-materi pembelajaran. Lebih dari itu, melalui tradisi lokal, materi pembelajaran diterima anak didik dalam bentuknya yang tidak indoktrinatif dan memnggurui. Pembelajaran terdisain dalam bentuk yang “ramah” anak. Model Pendidikan “Sakola” di Jambi (Musfarayani, 2004; Manurung, 2007) misalnya, menciptakan suasana belajar yang tidak berbeda dengan suasana keseharian anak didik. Guru mengajar dengan menggunakan pakaian sehari-hari masyarakat setempat (kemben atau kain yang dililitkan pada tubuh). Praktik belajar mengajar diselenggarakan di

alam terbuka, anak didik tidak harus mengenakan seragam sekolah, dan tidak “terbatasan” oleh durasi waktu tertentu. Dalam praktik pembelajaran seperti ini, guru tidak hanya memberikan materi pelajaran dengan menuang pengetahuan, tetapi wajib bertukar pikiran dengan anak didik. Bahkan dalam situasi tertentu, guru tidak hanya mengajar tetapi juga harus belajar melalui anak didiknya, misalnya membuat tikar (saluang) atau mengolah bahan pangan lokal (guntor). Pendeknya, pembelajaran didesain untuk dapat dimanfaatkan dalam keseharian serta terjangkau oleh pemikiran maupun kemampuan anak didik.

Di Bali, “Sekolah Banjar” mengedepankan tradisidan nilai-nilai lokal sebagai basis pemahaman dalam praktik pembelajaran yang ada (Topatimasang, 2005). Sekolah Banjar adalah asrama besatr kehidupan tempat masyarakat Bali melakukan pembelajaran diri. Di Sekolah Banjar mereka belajar praktik hidup toleran, seia sekata dan sepenanggungan yang disebut dengan para paro, saharepaananya, salunglung sabayantaka. Bale Banjar berperan sebagai pusat pembelajaran seni. Di Sekolah Banjar orang tua dan orang deawasa meneruskan ilmu pengetahuan Bali dari ngulat klangсах, ngulat ancak saji, dan membuat katik sate. Di Sekolah Banjar, nilai, ilmu, teknologi, dan berbagai keterampilan budaya dialihkan dari generasi ke generasi.

Bagaimana dengan pembelajaran berbasis budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta? Sekolah hanyalah merupakan salah satu tempat proses pembelajaran terjadi. Oleh sebab itu sejak 1922, Perguruan Tamansiswa di Yogyakarta meletakkan dasar pendidikan dan pembelajarannya dalam tri-pusat pendidikan. Pendidikan dan pembelajaran berlangsung dalam alam keluarga, alam masyarakat, dan alam perguruan atau sekolah. Pembelajaran dalam alam perguruan, Tamansiswa mengedepankan wawasan budaya dan identitas bangsa (Tilaar: 2005). Sekolah-sekolah Tamansiswa mendesain pembelajaran dalam sistem paguron, suatu tempat murid belajar hidup bermasyarakat (berbudaya) bersama gurunya dalam suatu lingkungan

perguruan. Dalam konteks kekinian, kira-kira pusistem paguron dalam bentuk modifikasi dapat dilihat pada sistem pembelajaran di SMA Taruna Nusantara Magelang.

Dalam penelusuran literatur, terlihat bahwa pembelajaran berbasis budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikemas dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal sebagai isi, metode, dan lingkungan pembelajaran utama telah dilakukan. Namun demikian, dalam beberapa hal perlu penguatan. Misalnya, dalam pembelajaran berbasis budaya belum menunjukkan secara spesifik kualitas anak didik dalam merespon dan menyadari persoalan sosial budaya yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Lambat laun praktik-praktik pembelajaran berbasis budaya yang pernah ada malah mulai tergerus dengan model pembelajaran lain yang menyebabkan anak didik tercerabut dari akar budaya lokal.

Pembelajaran berbasis budaya perlu dikembalikan, diperkuat, dipertajam, dan dikembangkan dengan konsep dan praksis yang semakin berkualitas. Kualitas menjadi sangat penting manakala ada keinginan kuat melihat seberapa jauh pendidikan berbasis budaya mampu menghasilkan out-put pembelajaran yang apresiatif dan kreatif atas nilai-nilai sosial budaya untuk melestarikan dan mengembangkan budaya lokal.

Misalnya, sebuah sekolah (SD) di Sleman, menyelenggarakan pembelajaran berbasis budaya dalam tiga kerangka dasar.

1. budaya sebagai isi pendidikan, dalam hal ini sekolah menyelenggarakan pembelajaran tentang budaya baik intra-kurikuler maupun ekstra kurikuler. Misalnya, membatik, tatah sungging wayang, karawitan, memasak kuliner lokal, menari, olahraga pencak silat, permainan tradisional gobak sodor, dan sebagainya.
2. budaya sebagai metode dalam pelaksanaan pembelajaran, dalam hal ini sekolah menyelenggarakan proses pengenalan, pengetahuan, pembiasaan, dan pembudayaan nilai-nilai budaya lokal. Misalnya; pelajaran matematika

tentang deret hitung dan deret ukur dengan ilustrasi ceritera wayang “Aji Candra Birawa”, pelajaran IPA (Fisika) tentang frekuensi bunyi dengan peraga instrumen gamelan, pelajaran IPA (Ekonomi) tentang transaksi dengan mengajak anak didik berkunjung ke pasar tradisional, pelajaran ilmu bumi tentang peta permukaan bumi dengan mengajak anak-anak ke lapangan bak pasir membentuk model daratan, dan sebagainya.

3. budaya sebagai konteks dan pendekatan dalam manajemen pendidikan, dalam hal ini sekolah menyelenggarakan proses pembelajaran dalam lingkungan budaya sehingga mewujudkan sekolah sebagai lingkungan yang berbudaya. Misalnya, pembiasaan sehari-hari di dalam rencana pengembangan sekolah (RPS) termasuk visi, misi, dan tujuan sekolah, program senyum-sapa-salam-sopan-santun, reposisi bahasa ibu, subasita, unggah-ungguh, tepa selira, keteladanan, dan sebagainya. Dalam budaya sekolah, hakikat pendidikan adalah mengubah budaya sekolah. Tiap-tiap sekolah telah memiliki school culture, maka RPS dikembangkan untuk mendobrak budaya negatif.

Belajar budaya merupakan proses belajar satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh dari beragam perwujudan yang dihasilkan dan atau berlaku dalam suatu komunitas. Mata pelajaran yang disuguhkan dalam kurikulum dan diajarkan kepada siswa di sekolah, sebagai pola pikir ilmiah, merupakan salah satu perwujudan budaya, sebagai bagian dari budaya. Bahkan, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mencerminkan pencapaian upaya manusia pada saat tertentu berbasiskan pada budaya saat itu.

Asal-muasal beragam mata pelajaran tersebut mungkin bukan dari Yogyakarta atau bukan dari komunitas budaya setempat. Namun, para guru sedang mempelajari mata pelajaran tersebut di lokal budaya setempat, dan para guru mengajak anak didik untuk belajar mata pelajaran tersebut di sekolah yang berada pada suatu komunitas budaya tertentu. Apakah, kemudian mata pelajaran tersebut berdiri sendiri? Menjadi suatu pengetahuan

yang baik untuk diketahui, tetapi tidak jelas untuk apa? Menjadi suatu identitas yang berada di luar budaya lokal setempat? Atau di luar budaya setempat? Itulah pentingnya sekolah menyelenggarakan pembelajaran berbasis budaya.

Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis budaya dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental (mendasar dan penting) bagi pendidikan, ekspresi dan komunikasi suatu gagasan, dan perkembangan pengetahuan.

Pembelajaran berbasis budaya merupakan salah satu cara yang dipersepsikan dapat:

1. menjadikan pembelajaran bermakna dan kontekstual yang sangat terkait dengan komunitas budaya, di mana suatu bidang ilmu dipelajari dan akan diterapkan nantinya, dan dengan komunitas budaya dari mana anda berasal;
2. menjadikan pembelajaran menarik dan menyenangkan. Kondisi belajar yang memungkinkan terjadinya penciptaan makna secara kontekstual berdasarkan pada pengalaman awal Anda sebagai seorang anggota suatu masyarakat budaya merupakan salah satu prinsip dasar dari teori konstruktivisme.

### **Budaya Pembentuk Budi Pekerti Luhur**

Pendidikan berbasis budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk menyiapkan insan terdidik yang berbudi pekerti luhur. Dengan demikian pendidikan berbasis budaya didesain dalam rangka Penumbuhan Budi Pekerti (PBP). PBP di sekolah adalah pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah, yang dimulai sejak masa orientasi peserta didik baru sampai dengan kelulusan, dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan sekolah pada jalur pendidikan khusus.

Implementasi gerakan PBP adalah upaya untuk menjadikan sekolah sebagai taman untuk menumbuhkan karakter positif bagi para peserta didik. Penumbuhan budi pekerti fokus dilakukan melalui kegiatan nonkurikuler pada seluruh jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan tahapan usia perkembangan peserta didik. Pada pelaksanaannya bersifat kontekstual atau disesuaikan dengan muatan lokal daerah. Jalur nonkurikuler dipilih karena selama ini kurang mendapat perhatian, padahal memiliki efek besar dalam belajar mengajar.

Penerapan PBP dilaksanakan melalui kemandirian peserta didik, seperti membiasakan keteraturan dan pengulangan yang dimulai sejak dari masa orientasi peserta didik baru, proses kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, sampai dengan kelulusan. Alur penerapan penumbuhan budi pekerti di sekolah diterapkan pada tahap diajarkan, dibiasakan, dilatih secara konsisten, kemudian menjadi kebiasaan, sehingga terbentuk karakter, dan akhirnya menjadi budaya dalam setiap perilaku anak didik.

#### 1. Penumbuhan Budi Pekerti Alur Pembudayaan dan Kegiatan Sehari-hari Di Sekolah

Sekolah selayaknya menjadi "taman" yang di dalamnya anak-anak Indonesia akan mendapatkan suasana belajar penuh tantangan tapi menyenangkan dan menumbuhkan budi pekerti luhur. Penumbuhan budi pekerti di sekolah dimulai bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Penumbuhan budi pekerti yang bersifat nonkurikuler melalui serangkaian kegiatan harian dan periodik wajib maupun pilihan untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai dan karakter positif.

#### 2. Penumbuhan Budi Pekerti Melalui Pemodelan

Penumbuhan budi pekerti efektif apabila melalui keteladanan yang ditampilkan orang-orang yang dekat dengan anak didik di sekolah maupun di rumah. Model budi pekerti luhur yang ditampilkan pendidik

dan tenaga kependidikan di sekolah, serta model budi pekerti luhur yang dilihat anak didik dari kedua orang tua dan saudara-saudaranya di rumah merupakan proses internalisasi nilai-nilai kebaikan yang tiada henti pada diri anak didik. Di Sekolah, keberadaan kepala sekolah dan guru yang memiliki budi pekerti yang baik menjadi teladan bagi anak didik dalam membiasakan diri berperilaku yang baik. Budi pekerti yang baik yang dilihat dalam keseharian oleh anak didik cepat atau lambat akan melahirkan anak didik yang memiliki ketahanan moral dan ketahanan budi pekerti.

### 3. Penguatan Sistem Tripusat Pendidikan

Gerakan penumbuhan budi pekerti menghendaki pelibatan semua pihak dalam menumbuhkan karakter anak didik. Disamping anak didik, para pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali, komite sekolah, alumni serta berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah harus terlibat. Hal ini menjelaskan bahwa mendidik karakter menjadi tanggung jawab bersama. Peserta didik akan membentuk karakter dan budi pekertinya melalui interelasi dengan semua pihak yang dapat dijumpainya.

Pada masa depan peserta didik akan hidup dengan lingkungan masyarakat yang beragam dan multi karakter. Terutama satuan pendidikan dan para guru menjadi tempat serta aktor utama dalam menggerakkan dan menumbuhkan pendidikan karakter sehingga setiap peserta didik diharapkan memiliki budi pekerti yang baik dan unggul. Para pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan masyarakat pada umumnya hendaknya konsisten melaksanakan gerakan penumbuhan budi pekerti sejak peserta didik masuk satuan pendidikan sampai mereka lulus. Orangtua/wali mengantarkan anak didik pergi ke sekolah. Para pendidik dan tenaga kependidikan datang lebih awal di sekolah untuk menyambut kedatangan peserta didik sesuai dengan tata nilai yang berlaku. Selesai pembelajaran orang tua menjemput anak didik dari lingkungan sekolah.

### C. SIMPULAN

1. Pendidikan berbasis budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta mengandung pengertian bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya. Budaya yang dimaksud adalah budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tetap mengapresiasi budaya nasional dan budaya daerah lain di Indonesia serta budaya global yang bersifat positif.
2. Pemahaman atas falsafah Hamemayu Hayuning Bawana (sebagai visi), Golong Gilig (sebagai semangat), Sawiji, Greget, Sengguh ora mingkuh (sebagai wataking satriya Ngayogyakarta) perlu diimplementasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Pemahaman falsafat tersebut diperlukan sebagai suatu bagian dari proses penguatan jatidiri pembentukan watak manusia berbudaya Jawa yang berudi pekerti luhur yang mampu mengembangkan budayanya sendiri serta mampu menjadi pelecut pengembangan budaya lain di Indonesia dan di dunia.
3. Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis budaya dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental (mendasar dan penting) bagi pendidikan, ekspresi dan komunikasi suatu gagasan, dan perkembangan pengetahuan.
4. Pembelajaran berbasis budaya dapat dibedakan menjadi tiga macam, ialah belajar tentang budaya (menempatkan budaya sebagai bidang ilmu), belajar dengan budaya (metode pemanfaatan budaya), belajar melalui budaya (pemahaman makna yang diciptakan baik melalui kreativitas maupun imajinasi dalam ragam perwujudan budaya).
5. Internalisasi pendidikan berbasis budaya dapat dilakukan oleh setiap individu baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat. Keluarga sebagai tempat pertama individu bersosialisasi perlu mengajarkan dan mendidik setiap individu untuk memahami apa manfaat yang dapat dirasakan dan kepuasan jika memaknai arti dari kebudayaan.

Dimulai dari tindakan kecil yang terus berkelanjutan sehingga menghasilkan individu yang mencintai kebudayaan tradisional maupun nasional yang ada di Indonesia.

6. Pelaksanaan pendidikan budi pekerti berbasis kearifan budaya lokal di sekolah memberikan dampak positif terhadap peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, kemampuan sekolah untuk mengimplementasikan otonomi sekolah terutama dalam mengembangkan muatan lokal sekolah, kebermaknaan pendidikan budi pekerti bagi anak didik, dan memperkuat dan mengembangkan tradisi, karena diwariskan melalui proses pendidikan dengan pendekatan pedagogik dan akademik yang lebih sistematis, terukur, serta disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. (1969). *Pola Pendidikan Tamansiswa*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Mejelis Luhur Persatuan Tamansiswa. (1977). *Karya Ki Hadjar Dewantara; Bagian I Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Manurung, Butet. (2007). *Sokola Rimba*, Yogyakarta: Insistpress.
- Musfarayani. (2004). *Sekolah Anak Rimba*, Jakarta: Surat Kabar Harian KOMPAS terbit tanggal 24Oktober 2004.
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2011). *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya*, Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2013). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017*, Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2014). *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Budaya di SD, SMP, SMA/SMK*, Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Subagya, Ki Sugeng. (2015). *Yogyakarta Barometer Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta: Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat terbit tanggal 26 Juni 2015.
- Subagya, Ki Sugeng, (2015). *Keistimewaan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Makalah dipresentasikan pada Seminar Penguatan Sekolah Model Pendidikan Berbasis Budaya SD Banyubening Karangmojo Gunungkidul, 7 Oktober 2015.
- Subagya, Ki Sugeng, (2016). *Ki Hadjar Dewantara Menawarkan Masa Depan*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Tilaar, H.A.R. (2005). *Manifesto Pendidikan Nasional Tinjauan dari Perspektif Postmodernise dan Studi Kultural*, Jakarta: KOMPAS.
- Tomatimasang, Roem, dkk. (2005). *Pendidikan Populer Membangun Kesadaran Kristis*, Yogyakarta: Insistpress.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.